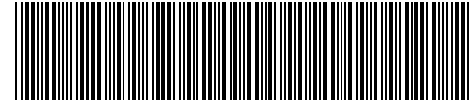




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.408777/2024**



DS:6738-7109-6126-9245

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
  3. Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
  4. Kode>Nama Satker : (408777) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN
- Sebesar : Rp. 543.319.000 ( LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi

013.08.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 543.319.000

Rp. 543.319.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	543.319.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAKASSAR II (136) Rp. 543.319.000

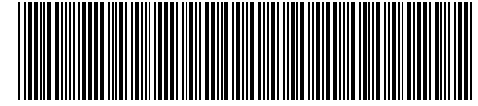
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408777/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6738-7109-6126-9245

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408777) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

Halaman : I A. 1

Program	: 013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi			543.319.000
Kegiatan	: 5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			543.319.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan			
	: 2. 01	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	34,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	502.153.000
Rincian Output	: 01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	34,00	Rekomendasi Kebijakan	502.153.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	21,00	Orang	41.166.000
Rincian Output	: 01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	21,00	Orang	41.166.000

Jakarta, 24 November 2023

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.

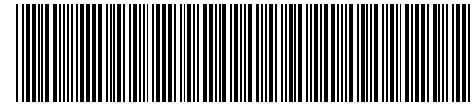
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.08.2.408777/2024

I B. SUMBER DANA



DS:6738-7109-6126-9245

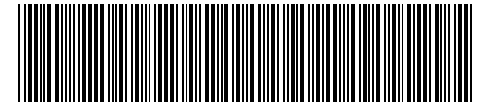
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
 Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
 Kode>Nama Satker : (408777) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	543.319.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	543.319.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408777/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6738-7109-6126-9245

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408777) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408777	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN	-	543.319	-	-	-	543.319		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	543.319	-	-	-	543.319		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	543.319	-	-	-	543.319		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	502.153	-	-	-	502.153	19 . 51	
01	RM	-	502.153	-	-	-	502.153	136	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	41.166	-	-	-	41.166	19 . 51	
01	RM	-	41.166	-	-	-	41.166	136	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>543.319</b>	-	-	-	<b>543.319</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408777/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6738-7109-6126-9245

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408777) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

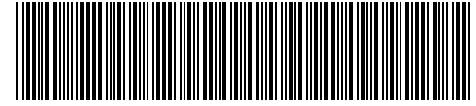
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408777	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	8.250	48.002	58.183	65.346	56.490	54.150	64.266	76.675	62.996	46.560	2.400	543.319
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	8.250	48.002	58.183	65.346	56.490	54.150	64.266	76.675	62.996	46.560	2.400	543.319
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	0	8.250	48.002	58.183	65.346	56.490	54.150	64.266	76.675	62.996	46.560	2.400	543.319
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	8.250	48.002	58.183	65.346	56.490	54.150	64.266	76.675	62.996	46.560	2.400	543.319

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408777/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:6738-7109-6126-9245

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408777] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

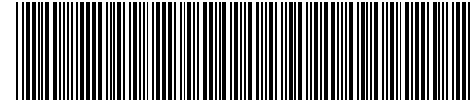
Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408777/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:6738-7109-6126-9245

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408777] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.  
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum  
NIP. 196908141996031001

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
**UNIT KERJA** (408777) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN  
**ALOKASI** Rp. 543,319,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi			543,319,000	
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			543,319,000	
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM[Base Line]	34.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		502,153,000	
-----					
	Lokasi : KOTA MAKASSAR				
<b>5250.ABD.001</b>	<b>Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah</b>	<b>34.0 Rekomendasi Kebijakan</b>		<b>502,153,000</b>	
<b>051</b>	<b>Persiapan Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah</b>			<b>11,090,000</b>	
A	TANPA SUB KOMPONEN			11,090,000	
521211	Belanja Bahan			11,090,000	RM
	(KPPN.136-Makassar II )				
	- ATK	1.0 PKT	3,350,000	3,350,000	
	- Penggandaan	1.0 PKT	2,840,000	2,840,000	
	- Komputer Supplies	1.0 PKT	4,900,000	4,900,000	
<b>052</b>	<b>Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah</b>			<b>383,895,000</b>	U
A	Koordinasi dengan Instansi Terkait			38,985,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			6,000,000	RM
	(KPPN.136-Makassar II )				
	- Honor Narasumber Es. II (Eksternal) [2 Org x 3 Jam x 0 Kali]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			32,985,000	RM
	(KPPN.136-Makassar II )				
	- Paket Meeting Fullday Es. III [78 Org x 1 Hari]	78.0 OP	400,000	31,200,000	
	- Uang Transport Panitia [7 Org x 1 Kali]	7.0 OK	150,000	1,050,000	
	- Uang Harian Panitia [7 Org x 1 Kali]	7.0 OH	105,000	735,000	
B	Pelaksanaan Harmonisasi			344,910,000	
521211	Belanja Bahan			224,000,000	RM
	(KPPN.136-Makassar II )				
	- Konsumsi Snack Rapat Harmonisasi [32 Org x 100 Kgt]	3200.0 OK	24,000	76,800,000	
	- Konsumsi Makan Rapat Harmonisasi [32 Org x 100 Kgt]	3200.0 OK	46,000	147,200,000	



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
**UNIT KERJA** (408777) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN  
**ALOKASI** Rp. 543,319,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II )			119,710,000	RM	
	> Harmonisasi Yang Membutuhkan Akomodasi			119,710,000		
	- Uang Harian [4 Org x 3 Hari x 11 Kali]	132.0 OH	430,000	56,760,000		
	- Uang Penginapan setara Es. IV [4 Org x 2 Hari x 11 Kali]	88.0 OH	500,000	44,000,000		
	- Transport Kab. Bulukumba [4 Org x 1 Kali]	4.0 OK	240,000	960,000		
	- Transport Kab. Luwu Utara [4 Org x 1 Kali]	4.0 OK	365,000	1,460,000		
	- Transport Kab. Tana Toraja [4 Org x 1 Kali]	4.0 OK	350,000	1,400,000		
	- Transport Kab. Sinjai [4 Org x 1 Kali]	4.0 OK	235,000	940,000		
	- Transport ke Kab. Bone [4 Org x 1 Kali]	4.0 OK	240,000	960,000		
	- Transport Kota Palopo [4 Org x 1 Kali]	4.0 OK	350,000	1,400,000		
	- Transport Kab. Wajo [4 Org x 1 Kali]	4.0 OK	230,000	920,000		
	- Transport Kota Pare-pare [4 Org x 1 Kali]	4.0 OK	225,000	900,000		
	- Transport Kab. Sidrap [4 Org x 1 Kali]	4.0 OK	230,000	920,000		
	- Transport Kab. Bantaeng [4 Org x 1 Kali]	4.0 OK	235,000	940,000		
	- Transport kab. Toraja Utara [4 Org x 1 Kali]	4.0 OK	350,000	1,400,000		
	>> Harmonisasi Yang Tidak Membutuhkan Akomodasi		0	6,750,000		
	- Biaya Transportasi [3 Org x 15 Kali]	45.0 OK	150,000	6,750,000		
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.136-Makassar II )			1,200,000		RM
	- Transport Lokal [2 Org x 4 Kali]	8.0 OK	150,000	1,200,000		
<b>053</b>	<b>Pelaksanaan Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah</b>			<b>105,918,000</b>		<b>U</b>
<b>A</b>	<i>Pemetaan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah</i>			35,100,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II )			4,200,000	RM	
	- Konsumsi Snack Rapat [20 Org x 3 Kgt]	60.0 OK	24,000	1,440,000		
	- Konsumsi Makan Rapat [20 Org x 3 Kgt]	60.0 OK	46,000	2,760,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II )			30,300,000	RM	
	- Uang Harian [4 Org x 3 Hari x 3 Kali]	36.0 OH	430,000	15,480,000		
	- Uang Penginapan setara Es. IV [4 Org x 2 Hari x 3 Kali]	24.0 OH	500,000	12,000,000		
	- Biaya Transportasi ke Kab. Pinrang [4 Org x 1 Kali]	4.0 OK	230,000	920,000		
	- Biaya Transportasi ke Kab. Sinjai [4 Org x 1 Kali]	4.0 OK	235,000	940,000		
	- Biaya Transportasi ke Kab. Bulukumba [4 Org x 1 Kali]	4.0 OK	240,000	960,000		
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.136-Makassar II )			600,000	RM	
	- Transport Lokal Koordinasi [2 Org x 2 Kali]	4.0 OK	150,000	600,000		
<b>C</b>	<i>Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah</i>			22,400,000		

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
**UNIT KERJA** (408777) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN  
**ALOKASI** Rp. 543,319,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II )			22,400,000	RM
	- Konsumsi Snack Rapat [32 Org x 10 Kgt]	320.0 OK	24,000	7,680,000	
	- Konsumsi Makan Rapat [32 Org x 10 Kgt]	320.0 OK	46,000	14,720,000	
<i>D</i>	<i>Perencanaan Kegiatan Fasilitas Perancang Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah</i>			<i>48,418,000</i>	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II )			48,418,000	RM
	> Konsultasi Teknis ke DKI Jakarta			48,418,000	
	- Uang Harian [3 Org x 3 Hari x 2 Kali]	18.0 OH	530,000	9,540,000	
	- Uang Penginapan Es. IV/Gol. III Kebawah [1 Org x 2 Hari x 2 Kali]	4.0 OH	730,000	2,920,000	
	- Uang Penginapan Es. III [2 Org x 2 Hari x 2 Kali]	8.0 OH	990,000	7,920,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Org x 2 Kali]	6.0 OK	3,829,000	22,974,000	
	- Uang Taksi (DKI Jakarta) [3 Org x 4 Kali]	12.0 OK	256,000	3,072,000	
	- Uang Taksi (Sulawesi Selatan) [3 Org x 4 Kali]	12.0 OK	166,000	1,992,000	
<b>054</b>	<b>Pelaporan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah</b>			<b>1,250,000</b>	
<i>A</i>	<i>Penyusunan Laporan</i>			<i>1,250,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II )			1,250,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan [5 PKT]	5.0 PKT	250,000	1,250,000	
<b>5250.ADG</b>	<b>Standarisasi Profesi dan SDM[Base Line]</b>	<b>21.0 Orang</b>		<b>41,166,000</b>	
<b>5250.ADG.001</b>	Lokasi : KOTA MAKASSAR <b>Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah</b>	<b>21.0 Orang</b>		<b>41,166,000</b>	
<b>051</b>	<b>Persiapan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan</b>			<b>3,950,000</b>	U
<i>A</i>	<i>Persiapan</i>			<i>3,950,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II )			3,950,000	RM
	- ATK	1.0 PKT	1,150,000	1,150,000	
	- Komputer Supplies	1.0 PKT	1,800,000	1,800,000	
	- Penggandaan	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
<b>052</b>	<b>Pelaksanaan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan</b>			<b>36,066,000</b>	U
<i>A</i>	<i>Penilaian Angka Kredit Perancang PUU di Daerah</i>			<i>1,400,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II )			1,400,000	RM
	- Konsumsi Snack Pendalaman Materi [10 Org x 2 Kgt]	20.0 OK	24,000	480,000	
	- Konsumsi Makan Pendalaman Materi [10 Org x 2 Kgt]	20.0 OK	46,000	920,000	
<i>B</i>	<i>Forum Pendalaman Materi</i>			<i>11,700,000</i>	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

**KEMEN/LEMB** (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORG** (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan  
**UNIT KERJA** (408777) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN  
**ALOKASI** Rp. 543,319,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II ) - Konsumsi Snack Pendalaman Materi [30 Org x 2 Kgt] - Konsumsi Makan Pendalaman Materi [30 Org x 2 Kgt]	60.0 OK 60.0 OK	24,000 46,000	4,200,000 1,440,000 2,760,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.136-Makassar II ) - Honor Narasumber Eselon III kebawah (Eksternal) [2 Org x 2 Jam x 2 Kali]	8.0 OJ	900,000	7,200,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.136-Makassar II ) - Transport Lokal Koordinasi [2 Org x 1 Kali]	2.0 OK	150,000	300,000	RM
C	<i>Penilaian Indeks Reformasi Hukum</i>			22,966,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II ) - Konsumsi Snack Indeks Reformasi Hukum [50 Org x 2 Kgt] - Konsumsi Makan Indeks Reformasi Hukum [50 Org x 2 Kgt]	100.0 OK 100.0 OK	24,000 46,000	7,000,000 2,400,000 4,600,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.136-Makassar II ) - Uang Harian [2 Org x 3 Hari x 1 Kali] - Uang Penginapan Es. IV/Gol. III Kebawah [1 Org x 2 Hari x 1 Kali] - Uang Penginapan Es. III [1 Org x 2 Hari x 1 Kali] - Biaya Tiket PP [2 Org x 1 Kali] - Uang Taksi (DKI Jakarta) [2 Org x 2 Kali] - Uang Taksi (Sulawesi Selatan) [2 Org x 2 Kali]	6.0 OH 2.0 OH 2.0 OH 2.0 OK 4.0 OK 4.0 OK	530,000 730,000 990,000 3,829,000 256,000 166,000	15,966,000 3,180,000 1,460,000 1,980,000 7,658,000 1,024,000 664,000	RM
053	<b>Pelaporan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan</b>			1,150,000	U
A	<i>Penyusunan Laporan</i>			1,150,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.136-Makassar II ) - Penggandaan dan Penjilidan [1 PKT]	1.0 PKT	1,150,000	1,150,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

Makassar, 7 Desember 2023